

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam sistem pendidikan nasional dengan jelas dikatakan bahwa fungsi pendidikan nasional adalah membentuk kemampuan dan melakukan peningkatan mutu kehidupan dan martabat individu sebagai upaya untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Terlebih lagi, bahwa fungsi pendidikan nasional bertujuan mengentaskan permasalahan dalam aspek kekurangan, kemunduran, kebodohan dan meningkatkan ketahanan nasional serta rasa persatuan dan kesatuan dengan berlandaskan budaya bangsa dan sesuai dengan Bhineka Tunggal Eka (Atmodiwiro, 2005:29). Selain sarana sekolah untuk pengendalian formal, sarana tambahan guna menunjang pendidikan adalah tercapainya layanan perpustakaan yang mencukupi baik dalam aspek jenis, jumlah, kualitas dan pemerataan ke wilayah Indonesia.

Selain perpustakaan yang disediakan sekolah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota wajib menyediakan perpustakaan sebagai fasilitas belajar. Dalam penjelasan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 35 disebutkan “.... Standar sarana dan prasarana pendidikan mencakup ruang belajar, tempat olahraga, tempat ibadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berekreasi, dan sumber belajar yang lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi”. Perpustakaan dapat digunakan sebagai fasilitas pendukung dalam

mengembangkan proses belajar - mengajar demi meningkatkan potensi individu agar menjadi manusia yang bermartabat dan menjadi warga demokratis (Sutarno. 2008: 8).

Transformasi atau perubahan *image* perpustakaan juga telah dilakukan pemerintah. Yang semula masyarakat menganggap perpustakaan hanya sekedar kegiatan membaca dan meminjam buku namun semenjak dilaksanakan revitalisasi perpustakaan maka terjadi perubahan *stigma* perpustakaan. Perpustakaan mengupayakan pemberian fasilitas buku dan teknologi secara terpadu untuk menarik minat baca masyarakat. Adanya transformasi tersebut dirancang dalam program Gerakan Literasi Sekolah yang mana adanya sinergi antara perpustakaan nasional dengan kementerian pendidikan dan kebudayaan.

Gerakan Literasi Sekolah merupakan suatu usaha atau kegiatan yang bersifat partisipatif dengan melibatkan warga sekolah (peserta didik, guru, kepala sekolah, tenaga pendidikan), akademis, penerbit, media massa hingga masyarakat dan pemangku kepentingan di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Gerakan Literasi Sekolah adalah gerakan sosial dengan dukungan kolaboratif berbagai elemen. Upaya yang dilakukan dalam mensukseskan Gerakan Literasi Sekolah dapat dengan penyesuaian kegiatan membaca oleh anak usia sekolah yang dilakukan satu perempat jam. Dengan adanya pembiasaan tersebut terbentuk maka selanjutnya akan diarahkan ke tahap pengembangan dan pembelajaran. Variasi kegiatan dapat berupa pengembangan keterampilan reseptif maupun produktif. Dalam pelaksanaannya, pada periode tertentu yang terjadwal, dilakukan asesmen agar

dampak keberadaan Gerakan Literasi Sekolah dapat diketahui dan terus-menerus dikembangkan.

Menurut Clay dan Ferguson (2001) dalam Buku Desain Induk Gerakan Literasi Sekolah (2016:8) menjabarkan bahwa komponen literasi informasi terdiri atas;

1. Literasi Dini (*Early Literacy*), yaitu kemampuan untuk memperhatikan, memahami bahasa lisan, dan berkomunikasi melalui gambar dan lisan sehingga akan membentuk pengalaman yang baik dalam berinteraksi dengan kehidupan sosial.
2. Literasi Dasar (*Basic Literacy*), yaitu kemampuan untuk mendengarkan, berbicara, membaca, menulis, dan menghitung berkaitan dengan kemampuan analisis untuk memperhitungkan, mempersepsikan informasi, mengkomunikasikan, serta menggambarkan informasi berdasarkan pemahaman dan pengambilan kesimpulan pribadi.
3. Literasi Perpustakaan (*Library Literacy*), antara lain memberikan pemahaman cara membedakan bacaan fiksi dan nonfiksi, memanfaatkan koleksi referensi dan periodikal, memahami *Dewey Decimal System* sebagai klasifikasi pengetahuan yang memudahkan dalam menggunakan perpustakaan, memahami penggunaan katalog dan pengindeksan, hingga memiliki pengetahuan dalam memahami informasi ketika sedang menyelesaikan sebuah tulisan, penelitian, pekerjaan atau mengatasi masalah.

4. Literasi Media (*Media Literacy*), yaitu kecakapan untuk memahami bentuk bentuk media, seperti cetak, media eletronik, media digital serta mengetahui perbedaan atau cara pemanfaataannya.
5. Literasi Teknologi (*Technology Literacy*), yaitu kecakapan individu dalam mengetahui macam macam teknologi, seperti peranti keras, peranti lunak, serta etika dan etiket dalam memanfaatkan teknologi.
6. Literasi Visual (*Visual Literacy*), adalah kecakapan individu dalam mengetahui perbedaan antara literasi melalui media dan teknologi, yang selanjutnya dapat melakukan pengembangan terkait manfaat dari materi visual dan audiovisual. Tafsir terhadap materi visual yang tidak terbedung, baik dalam bentuk cetak, auditori, maupun digital (perpaduan ketiganya disebut teks multimodal), perlu dikelola dengan baik. Bagaimanapun di dalamnya banyak manipulasi dan hiburan yang benarbenar perlu disaring berdasarkan etika dan kepatutan.

Kegiatan literasi sekolah membutuhkan partisipasi semua pemangku kepentingan di tingkat pemerintahan dari tingkat pemerintah pusat, LPMP, Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten/Kota dan satuan pendidikan di tingkat sekolah. Di tingkat satuan pendidikan, yang menerima perlakuan (intervensi) adalah kepala sekolah, pengawas, guru, TLS, dan masyarakat (termasuk dunia usaha dan industri). Perlakuan yang akan diberikan kepada setiap unsur akan berbeda sesuai dengan peran dan kapasitasnya dalam pendidikan terkait dengan kebijakan yang berlaku. Dari unsur masyarakat dapat dilibatkan antara lain: lembaga masyarakat di bidang pendidikan, kebudayaan, perpustakaan masyarakat, taman bacaan masyarakat, dan

para tokoh masyarakat. Pelibatan dari dunia industri dapat berupa program pendidikan yang merupakan implementasi dari tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*). Kesuksesan program literasi sekolah dapat dicapai apabila masing-masing pemangku kepentingan memiliki kapasitas yang memadai untuk melaksanakan program literasi sesuai dengan perannya.

Selanjutnya, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) melakukan perbaikan peran perpustakaan guna memperbaiki pembangunan sosial budaya melalui literasi sehingga seluruh elemen masyarakat umum dapat memanfaatkan fasilitas perpustakaan dengan baik. Pada 2015, Bappenas meluncurkan kebijakan transformasi revitalisasi pelayanan perpustakaan. Kebijakan ini diperkuat melalui rencana kerja pemerintah (RKP) pada tahun 2019, dengan menjadikan literasi untuk peningkatan minat baca masyarakat. Hal ini senada dengan yang dilakukan oleh Perpustakaan Nasional ketika mengadakan sosialisasi pengembangan program revitalisasi perpustakaan pada tanggal 29 Agustus 2019. Kepala perpustakaan nasional mengatakan bahwa, perpustakaan nasional mengamanatkan kepada seluruh perpustakaan di Indonesia diwajibkan untuk melaksanakan pembinaan, pengembangan dan evaluasi serta koordinasi guna melaksanakan revitalisasi perpustakaan sesuai dengan yang tertuang pada Undang-Undang nomor 43 tahun 2007 tentang perpustakaan. Tujuan dari adanya program revitalisasi perpustakaan ialah untuk meningkatkan layanan perpustakaan, meningkatkan peran dan fungsinya, melaksanakan revolusi mental guna meningkatkan budaya baca melalui banyak program dan kegiatan.

Sejak 2014 Surabaya mendeklarasikan sebagai kota literasi, hal tersebut sebagai acuan untuk meningkatkan minat baca masyarakat. Dengan menyebutkan dirinya sebagai kota literasi maka pemerintah kota Surabaya memiliki program kebijakan yang berpihak pada masyarakat umum dengan mendirikan taman bacaan, meningkatkan peran guru atau pihak sekolah sebagai lembaga pendidikan formal, meningkatkan anggaran guna meningkatkan pengadaan buku bacaan serta meningkatkan peran perpustakaan umum kota Surabaya dengan atau dapat melalui program revitalisasi perpustakaan.

Perpustakaan Umum Kota Surabaya merupakan perpustakaan daerah milik pemerintah kota Surabaya, segala fasilitas dan program yang telah dan sedang dijalankan tentunya menjadi tanggung jawab pemerintah kota Surabaya. Dalam mensukseskan program gerakan literasi tentunya Perpustakaan Umum Kota Surabaya melakukan tahapan atau cara penunjang. Salah satu cara yang dilakukan ialah revitalisasi perpustakaan. Revitalisasi perpustakaan yang target pelaksanaannya mengubah paradigma perpustakaan yang semula hanya sekedar tempat membaca dan meminjam buku namun, selanjutnya diharapkan di perpustakaan juga terdapat penyediaan teknologi sehingga minat berkunjung masyarakat ke perpustakaan dapat meningkat. Revitalisasi secara harfiah berarti kegiatan untuk menyadarkan, menyegarkan kembali, menghidupkan kembali, atau membangkitkan kembali (Echols & Shadily, 1992). Revitalisasi (dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia online) adalah proses, cara, perbuatan menghidupkan atau menggiatkan kembali. Mengacu dari beberapa pengertian revitalisasi di atas, maka revitalisasi fungsi perpustakaan umum bagi masyarakat adalah usaha yang

dilakukan agar perpustakaan umum dapat memegang fungsi sebagaimana mestinya.

Sinaga (2004) mengatakan bahwa perpustakaan dapat dikatakan menjadi agen perubahan sosial jika a) perpustakaan memberikan kontribusi bagi kehidupan keluarga sebagai unit kehidupan sosial; b) dapat menolong masyarakat memanfaatkan waktu luang menjadi lebih manfaat; c) dapat meningkatkan kehidupan demokrasi dan menjadi warga negara yang baik; d) dapat dimanfaatkan sebagai instrumen untuk menumbuhkan keinginan belajar berkelanjutan; e) perpustakaan dapat memberikan kontribusi penting dalam menumbuhkan ekonomi masyarakat. Selain itu terdapat faktor pendorong revitalisasi peran perpustakaan, antara lain, (Widuri, 2016:111)

- a. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat dan tidak selalu diikuti lapisan masyarakat sehingga perpustakaan dapat memberikan layanan tersebut.
- b. Meningkatnya masyarakat yang berpendidikan.
- c. Mobilitas masyarakat yang tinggi

Perpustakaan sebagai fasilitas umum tentunya mempunyai visi misi yang berguna untuk masyarakat. Kesuksesan perpustakaan dapat dilihat dari banyaknya pengunjung pada tiap periode, hal ini berlaku pula di Perpustakaan Umum Kota Surabaya.

Tabel 1.3
Jumlah Pengunjung Perpustakaan Umum Kota Surabaya Tahun 2013 - 2017

	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah	14.216.356	17.735.360	20.115.476	20.996.671	11.336.736

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Surabaya (2018)

Dengan adanya tabel diatas maka dapat diketahui bahwa pengunjung Perpustakaan Umum Kota Surabaya pada 2017 mengalami penurunan yang sangat signifikan dan selisih 9ribu dengan tahun 2016. Selain adanya data jumlah pengunjung perpustakaan, terdapat pula perkembangan jumlah anggota perpustakaan.

Tabel 1.4
Perkembangan Jumlah Anggota Perpustakaan Umum Kota Surabaya Tahun 2013 – 2017

Tahun	Jumlah
2013	384.451
2014	396.534
2015	408.507
2016	7.057
2017	4.990

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Surabaya (2018)

Dengan adanya tabel diatas maka dapat diketahui jumlah masyarakat Surabaya yang menjadi anggota perpustakaan terus mengalami penurunan yang signifikan.

Faktor penyebab adanya program revitalisasi perpustakaan adalah keadaan minat baca masyarakat yang masih rendah. Guna memadukan kedua faktor tersebut maka dari itu gerakan literasi juga didasari dengan pemberian pelatihan keahlian masyarakat berbasis teknologi dan pemberian fasilitas bahan bacaan. Berdasarkan penelitian kemampuan membaca yang dilakukan oleh *The Programme for International Student Assessment (PISA)* dalam Yunus A, dkk (2017:277) yang telah melakukan penelitian tingkat kemampuan membaca pada peserta didik sejak tahun 2000, mengatakan bahwa

Indonesia merupakan negara dengan tingkat kemampuan membaca rendah. Berdasarkan penilaian PISA pada tahun 2000 diketahui Indonesia memiliki skor 371, serta menduduki negara dengan kemampuan membaca terendah ketiga dari negara negara yang dinilai. Pada tahun 2003 skor kemampuan membaca peserta didik Indonesia sebesar 383. Hasil tersebut menempatkan Indonesia berada pada peringkat ke-39 dari 40 negara. Pada tahun 2006 skor kemampuan membaca Indonesia mengalami sedikit peningkatan yakni sebesar 393. Meskipun demikian, rata rata siswa Indonesia termasuk kategori paling rendah dengan skor 358 sampai 420 dengan menempati peringkat ke-48 dari 56 negara yang termasuk dalam penelitian PISA. Kemampuan membaca pemahaman hasil penilaian PISA pada tahun 2009 terhadap siswa Indonesia kemabali menunjukkan kategori rendah, yakni sebesar 402 dan menempatkan Indonesia pada peringkat ke-57 dari 65 negara yang dinilai. Pengukuran kembali dilakukan pada tahun 2012 dan 2015 yang menunjukkan hasil yang sama, yakni siswa Indonesia masih memiliki kemampuan membaca yang rendah.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan PISA. Menurut data UNESCO dalam Dewi Puspitasari, dkk (2019:93) mengenai minat baca masyarakat Indonesia menunjukkan 0,001 persen. Artinya, dalam seribu orang hanya ada satu orang yang benar benar tekun membaca dan memiliki minat baca. Hasil penelitian literasi International yang dirilis Central Connecticut State University juga membawa berita yang kurang menyenangkan. Hasil penelitian menempatkan budaya literasi

Indonesia masuk ke urutan 64 dari 65 negara yang diteliti. Hasil itu memperlihatkan bahwa Indonesia menempati rangking kedua terburuk dari bawah tentang budaya literasi.

Menurut Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan terdapat penyebab rendahnya minat dan kebiasaan membaca dikarenakan adanya faktor dimensi akses, dimensi kecakapan, dimensi alternatif dan dimensi budaya. a) dimensi kecakapan dapat dilihat indikatornya berupa bebas buta aksara dan rata-rata lama sekolah; b) dimensi akses berkaitan dengan perpustakaan daerah, perpustakaan umum, perpustakaan komunitas dan perpustakaan sekolah; c) dimensi alternatif berkaitan dengan penggunaan internet, membaca daring dan media *online*; d) dimensi budaya dimaknai sebagai bagian dari kebiasaan membaca seperti meminjam buku di perpustakaan, memanfaatkan taman bacaan serta membaca koran dan buku. Dari keempat dimensi tersebut, hasil survei untuk dimensi akses adalah yang paling rendah yaitu 23,09%, dimensi kecakapan 75,92%, dimensi alternatif 40,49% dan dimensi budaya 28,50%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat korelasi antara akses dengan kebiasaan masyarakat.

Selama ini, jika masyarakat diharapkan hadir di perpustakaan memiliki *problem* klasik, misalnya perpustakaan hanya dikenal oleh kalangan terbatas, pelajar dan mahasiswa. Sementara kalangan yang lain merasa jauh, *image* perpustakaan hanya boleh dikunjungi mereka yang bersepatu, memiliki kartu anggota, jam kunjung yang ketat dan tidak boleh berisik. Artinya satu sisi mengalami problematika klasik, disisi lain munculnya berbagai perpustakaan sebagai sebuah alternatif masyarakat untuk mendapatkan layanan informasi dan pendidikan. Perpustakaan memiliki

kedudukan strategis dalam mengembangkan dan meningkatkan minat baca masyarakat (Kalida, 2015:6). Selain adanya penyebab secara global, fenomena yang terjadi di Surabaya menunjukkan bahwa IPM Surabaya merupakan yang memperoleh presentase paling tinggi di Provinsi Jawa Timur, namun tidak diimbangi dengan minat masyarakat untuk melakukan kunjungan ke perpustakaan, hal ini dapat diketahui dari menurunnya presentase angka kunjungan masyarakat ke Perpustakaan Umum Kota Surabaya. Selain itu juga terdapat alasan perlu dilakukannya revitalisasi perpustakaan menurut Munawaroh (2020:59) revitalisasi perpustakaan dilakukan supaya perpustakaan terlaksana sesuai dengan peran dan fungsinya. Tujuan dari program revitalisasi perpustakaan selain mengembalikan peran dan fungsi perpustakaan sebagaimana mestinya juga dapat sebagai salah satu solusi untuk dapat meningkatkan minat baca.

Maka dari itu penulis akan melakukan penelitian tentang “Pengaruh Revitalisasi Perpustakaan Terhadap Minat Baca Pengunjung di Perpustakaan Umum Kota Surabaya” untuk mengetahui apakah program revitalisasi perpustakaan mempunyai pengaruh atau tidak terhadap minat baca pengunjung.

B. Rumusan Masalah

Dengan adanya latar belakang diatas sekiranya dapat ditarik sebuah rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, dan dirumuskan sebagai berikut

1. Apakah terdapat pengaruh revitalisasi perpustakaan terhadap peningkatan jumlah pengunjung di Perpustakaan Umum Kota Surabaya?

2. Apakah terdapat pengaruh minat baca terhadap peningkatan jumlah pengunjung di Perpustakaan Umum Kota Surabaya?
3. Apakah revitalisasi perpustakaan berpengaruh terhadap peningkatan minat baca pengunjung di Perpustakaan Umum Kota Surabaya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan penelitian, maka dapat ditetapkan tujuan penelitian adalah

1. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara revitalisasi perpustakaan terhadap peningkatan jumlah pengunjung di Perpustakaan Umum Kota Surabaya
2. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara minat baca terhadap peningkatan jumlah pengunjung di Perpustakaan Umum Kota Surabaya
3. Untuk mengetahui apakah revitalisasi perpustakaan berpengaruh terhadap peningkatan minat baca pengunjung di Perpustakaan Umum Kota Surabaya

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan banyak manfaat bsgl semua pihak-pihak yang bersangkutan yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Untuk meningkatkan kemampuan berpikir melalui penulisan karya ilmiah, dan untuk menambah pengetahuan, kajian, dan pemahaman tentang pengaruh program revitalisasi perpustakaan Surabaya berbasis inklusi sosial terhadap minat baca pengunjung. Selain itu, penelitian ini dapat digunakan sebagai perbandingan teori yang didapat selama perkuliahan dengan keadaan yang terjadi sebenarnya di lapangan.

2. Bagi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Surabaya

Memberikan saran sebagai masukan bagi pihak yang berkepentingan untuk mengetahui pengaruh Program Revitalisasi Perpustakaan Umum Kota Surabaya guna meningkatkan minat baca pengunjung.

3. Bagi Universitas Pembangunan Nasional “VETERAN” Jawa Timur

Sebagai bahan referensi yang dapat dimanfaatkan sebagai acuan oleh peneliti lainnya yang ingin mengembangkan kajian serupa di masa mendatang, serta untuk menambah referensi perpustakaan Universitas Pembangunan Nasional “VETERAN” Jawa Timur khususnya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Administrasi Negara.